**STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**ARTIKEL DISERTASI**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Syarat Guna Mengikuti**

**Seminar Tertutup Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial**

**Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

**Oleh:**

**Dedy Suhendi**

**189020029**



**PROGRAM DOKTOR ILMU SOSIAL**

**BIDANG KAJIAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**ABSTRAK**

Sejak tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, bahwa pemerintah kabupaten indramayu melarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, meminum, mengoplos, menjamu dan meminum minuman beralkohol tanpa terkecuali dalam wilayah kabupaten indramayu. Implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu bertujuan untuk menekan bahkan menghilangkan peredaran minuman beralkohol yang pada akhirnya akan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Indramayu pada saat ini masih ada dan hampir merata, karena hampir di setiap daerah di wilayah kecamatan indramayu termasuk took-toko dan warung-warung kecil di desa masih menjual minuman beralkohol dimaksud. Kendala tersebut dikarenakan beberapa faktor internal dan faktor ekternal, yaitu masih terbatasnya sumber daya baik sumber daya anggaran maupun sumber daya aparatur, termasuk koordinasi yang dilakukan antar badan pelaksana masih kurang. Kendala lainnya yaitu lingkungan sosial dan budaya dimana hampir setiap pesta rakyat (termasuk pernikahan) tuan hajat menyediakan minuman yang mengandung alkohol, pun juga para nelayan yang akan melaut selalu mengkonsumsi minuman beralkohol dengan alasan agar tubuh hangat. Ditambah dengan Sanksi yang diberikan aparat penegak hukum kepada pelanggar tidak menimbulkan efek jera.

Hasil analisis SWOT menunjukan bahwa posisi strategi bagi implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di kabupaten indramayu adalah strategi agresif guna mendukung implementasi kebijakan dimaksud. Posisi tersebut menandakan bahwa pilihan strategi yang tepat adalah dengan menitikberatkan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kekuatan dimaksud adalah adanya kejelasan standar dan sasaran kebijakan serta dukungan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dimana masyarakat Kabupaten Indrmayau mayoritas beragama Islam (99,68%).

Penelitian menghasilkan novelty berupa teridentifikasinya faktor lain yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dimaksud, yaitu faktor budaya masyarakat dimana beberapa kalangan masyarakat masih terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat hajatan atau pesta rakyat dan kebiasaan para nelayan yang membawa minuman berlakohol saat melaut dengan alasan untuk menghangatkan tubuh. Faktor lainnya adalah belum tegasnya sanksi yang diberikan oleh Lembaga pengadilan yang tidak menimbulkan efek jera.

**Kata kunci : Strategi Implementasi Kebijakan**

***ABSTRACT***

*Since 2005 the Indramayu Regency Government has established a policy of prohibiting the circulation and sale of alcoholic beverages in the form of Indramayu Regency Regional Regulation Number 7 of 2005 as amended by Indramayu Regency's Regional Regulation Number 15 of 2006 concerning Amendments to Indramayu Regency's Regional Regulation Number 7 of 2005 concerning the Prohibition Alcoholic Drinks in Indramayu Regency, that the Indramayu Regency government prohibits producing, distributing, trading, drinking, mixing, entertaining and drinking alcoholic beverages without exception within the Indramayu Regency area. The implementation of the policy on the prohibition of alcoholic beverages in Indramayu Regency aims to suppress and even eliminate the circulation of alcoholic beverages which in turn will create public order and public peace. Circulation of alcoholic beverages in the Indramayu Regency area is still present and almost evenly distributed, because almost every area in the Indramayu sub-district including shops and stalls in the village still sells alcoholic beverages. These constraints are due to several internal and external factors, namely limited resources, both budgetary resources and apparatus resources, including coordination between implementing agencies is still lacking. Another obstacle is the social and cultural environment where almost every party of the people of Tuan Hajat provides drinks containing alcohol, the fishermen who will go to sea always consume alcoholic beverages with the reason that the body is warm. Coupled with the sanctions given by law enforcement officers to violators, it does not have a deterrent effect.*

*The results of the SWOT analysis show that the strategic position for the implementation of the policy for the prohibition of alcoholic beverages in Indramayu district is an aggressive strategy to support the implementation of the said policy. This position indicates that the choice of the right strategy is to emphasize the strategy of using strengths to take advantage of opportunities. The strength in question is the clarity of standards and policy targets as well as support from community and religious leaders where the majority of the people of Indramayu Regency are Muslim (99.68%).*

*The research resulted in a novelty in the form of identifying other factors that determine the success of the implementation of the policy, namely the cultural factor of the community where some people are still accustomed to consuming alcoholic beverages during celebrations or public parties and the habit of fishermen who bring alcoholic drinks while at sea with reasons to warm the body. Another factor is the lack of firm sanctions imposed by the judiciary which do not create a deterrent effect.*

***Keywords: Policy Implementation Strategy***

**DAFTAR PUSTAKA**

Chandler, R.C. & J.C. Plano. 1988. The Public Administration Dictionary. Second Edition. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.

Dwiyanto Indiahono, S.Sos.,M.Si. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis, Edisi Ke-2 Revisi. Cetakan I, 2017. Gava Media. Yogyakarta.

Edward, G.C., 1980. Implementeing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Edwards III, George, C., 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Erwan Agus Purwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.Si. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikaisnya di Indonesia. Cetakan II, 2015. Gava Media. Yogyakarta.

Grindle, Mirilles, S., 1980. Politics and Implementation in The Third World, Princeton University Press, New Jersey.

Hughes, O. 2003. Public Management ang Administration: An Introduction. Third Edition. New York: Palgrave Macmillan.

Lexy J. Moleong, Prof., DR. M.A. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Cetakan ketigapuluhenam, 2017. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Parson, Wayne. 2006-cetakan kedua. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana: Jakarta.

Sabatier, P.A. dan D, Mazmanian, 1980. “The Implementation of Public Policy: A Framework og Analisys”. Policy Studies Journal 8 (Special Issue NO.2.)

Said Zainal Abifdin, Prop.,Ph.D., MPIA. Kebijakan Publik. Edisi 3. 2016. Salemba Humanika. Jakarta.

Subarsono, AG., 2005. Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi: Pluto Press.

Yeremias T. Keban, Prof. S.U., MURP, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Edisi Revisi. Cetakan I, 2019. Gava Media, Yogyakarta.

Dewi Setyo Rini, Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Jurnal,2015)

Gichoya, *Information And Communication Technologies (ICT) Government to Support Improveents Inproductivity, Management Effectiveness and Ultimately, The Quality of Services Offered to Citizens* (disertasi 2014,)

H.S. Maltha, Strategi Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Polri Dalam Menangani Cyber Crime Guna memperkokoh Ketahanan Nasional (disertasi,2018)

Lusi Andriani, Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Jurnal, 2017)

Muhammad Fadly, Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis One District One Product Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu (disertasi,2019)

Taufiq Rachmat Hidayat, Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Di Kota Bekasi (disertasi,2020)

Yulianus Dica Ariseno Adi, Widodo Tresno Novianto dan Supanto, Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Jurnal, 2019)

Zulkifli Said, Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Di Provinsi DKI Jakarta (disertasi,2018)

**Dokumen lain** :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukuam Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang - Barang Dalam Pengawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Opersional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Nota Kesepahaman Antara Menteri Dalam Negeri RI dengan Kapolri Nomor: 119/352/SJ dan Nomor: B/3/I/2017 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat Di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana minimal, Pembinan Teknis Operasionalk dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayu

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu.

Dewi Setyo Rini (2015), Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Tulungagung UIN.

Gichoya (2014), *Factors Affecting The Succesful Policy Implementation of ICT Projects in Governments, Research School of Informatics.*

H.S. Maltha (2018), Strategi Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Polri Dalam Menangani Cyber Crime Guna memperkokoh Ketahanan Nasional. Jatinangor IPDN

Lusi Andriani (2017), Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013. Makassar UNHAS

Taufiq Rachmat Hidayat (2020), Implementasi Kebijakan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat di Kota Bekasi. Bandung UNPAS.

Yulianus Dica Ariseno Adi, Widodo Tresno Novianto dan Supanto (2019)Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali. Surakarta UNS.

Zulkifli Said (2018), Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi Di Provinsi DKI Jakarta. Jatinangor IPDN.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

NAMA : DEDY SUHENDI

NIP : 197104261991011002

PANGKAT / GOL : IVb / Pembina Tk.I

TEMPAT / TGL LAHIR : Bandung / 26 April 1971

JABATAN : Fungsional Dosen (Lektor)

Ka GKM Pascasarjana IPDN

RIWAYAT JABATAN :

1. Dosen IPDN Jatinangor
2. Kepala Bagian Kepegawaian IPDN Jatinangor
3. Kepala Bagian Adm. Akademik Kerjasama IPDN Kampus Kalbar
4. Kepala Bagian Adm. Keprajaan IPDN Kampus Kalbar
5. Kepala SatpolPP Kab. Indramayu
6. Plt. Kadishubkominfo Kab. Indramayu
7. Kepala Seksi Operasional SatpolPP
8. Kepala Subbag Kekayaan dan Keuangan Desa
9. Kepala Subbag Pemberdayaan Lembaga Desa
10. Ajudan Bupati indramayu

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. UNTAG Cirebon
2. UNDIP Semarang
3. STPDN Jatinangor
4. SMA N 6 Bandung
5. SMP Pasundan 6 Bandung
6. SD N Sangkuriang 3 Bandung

RIWAYAT KEDIKLATAN :

1. Diklatpim II di BPSDM Kemendagri Jakarta
2. TOT SAR Pencarian dan Penyelamatan Akibar Bencana di Wing III Paskhas TNI AU Bandung
3. Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Pamong Praja di Bandung
4. Diklat Pelopor Keselamatan Lalu Lintas di Indramayu
5. Diklat Teknis Pengadaan Barang jasa
6. Diklat Bela Negara
7. Diklat Perkeretaapian Provinsi

Dokumen pendukung (foto)

1. Proses wawancara, fgd dan triangulasi
2. Proses kegiatan operasi mihol sampai penerapan sanksi

   



 



 

     



